

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN
BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025
(Studi di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

**DEVAN FARID HIDAYAT
NPM. 2216041064**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025

(Studi di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung)

Oleh

DEVAN FARID HIDAYAT

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan seluruh kementerian dan pemerintah daerah melakukan penghematan belanja non-prioritas untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Di Provinsi Lampung, kebijakan ini diterapkan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) melalui pemangkasan anggaran administratif dan penyesuaian program kerja tanpa mengganggu proyek infrastruktur utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan efisiensi anggaran di Dinas BMBK Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung diwujudkan melalui pemangkasan belanja non-prioritas, khususnya belanja administratif, tanpa menghentikan proyek infrastruktur strategis. Namun demikian, masih ditemukan kerusakan pada sejumlah ruas jalan yang menunjukkan keterbatasan capaian kinerja. Efektivitas belum optimal karena penghematan anggaran belum sepenuhnya sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik, meskipun pagu anggaran tahun 2025 mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Efisiensi anggaran, Implementasi kebijakan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, *Value for Money*, keuangan publik.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF BUDGET EFFICIENCY POLICIES BASED ON PRESIDENTIAL INSTRUCTION NUMBER 1 OF 2025

(Study at the Lampung Provincial Public Works and Construction Agency)

By

DEVAN FARID HIDAYAT

The government, through Presidential Instruction No. 1 of 2025, established a budget efficiency policy that requires all ministries and local governments to cut non-priority spending in order to maintain fiscal sustainability. In Lampung Province, this policy was implemented by the Public Works and Construction Agency (BMBK) through administrative budget cuts and work program adjustments without disrupting major infrastructure projects. This study aims to analyze the implication of the budget efficiency policy at the BMBK Office of Lampung Province. The method used is descriptive qualitative with interview and documentation techniques.

Based on the results of the study, the implementation of budget efficiency policies based on Presidential Instruction No. 1 of 2025 at the Lampung Provincial Public Works and Construction Agency was realized through cuts in non-priority spending, particularly administrative spending, without halting strategic infrastructure projects. However, damage was still found on a number of road sections, indicating limitations in performance. However, the effectiveness has not been optimal because budget savings have not been fully aligned with the achievement of infrastructure development goals and improvements in the quality of public services, even though the 2025 budget ceiling has increased.

Keywords: Budget efficiency, Policy implementation, Presidential Instruction No. 1 of 2025, Value for Money, public finance.

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN
BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025
(Studi di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung)**

Oleh

DEVAN FARID HIDAYAT

Skripsi

Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
EFISIENSI ANGGARAN BERDASARKAN
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN
2025 (Studi di Dinas Bina Marga Bina
Konstruksi Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Devan Farid Hidayat**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216041064**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dewic Brima Atika, S.IP., M.Si.

NIP. 198212122008012017

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

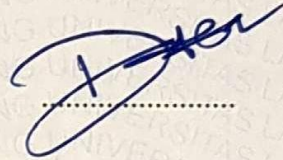
Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.

NIP. 19700914 200604 2 001

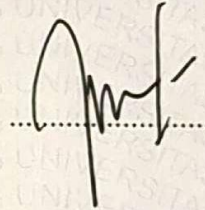
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua: **Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**



Penguji: **Prof. Dr. Yulianto, M.S.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **05 Mei 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 05 Mei 2026

Yang membuat Pernyataan,



Devan Farid Hidayat

NPM. 2216041064

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Devan Farid Hidayat, lahir di Kota Serang, Provinsi Banten pada tanggal 15 Maret 2004. Penulis lahir dari pasangan Ayah Hidayatinuri dan Ibu Ida Farida, S.Sos., M.A. Merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Islam Amanah Kota Serang pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 13 Serang dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun yang sama di Daar El-Qolam 2 Desa pasir Gintung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2019. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di MAN 2 Kota Serang dan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 Penulis diterima menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) dan menjadi Wakil Ketua umum pada tahun 2025. Pada bulan Januari 2025 sampai bulan Februari 2025 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Setiap rupiah dalam APBN harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.”

(Sri Mulyani)

“The success of public policy depends not only on decision making, but on effective implementation.”

(George C. Edwards III)

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain."

(HR. Ahmad)

“Berdirilah diatas kaki sendiri, tanpa menebas kaki orang lain"

(Entis Sutisna)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur dan Hikmat, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Berkat cinta dan kasih sayang-MU yang telah memberikan kekuatan membekali dengan pengetahuan. Berkat anugerah dan kemudahan yang engkau berikan.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Ayah Hidayatinuri dan Ibu Ida Farida.

Yang telah membesarkan dengan sabar dan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan, memberikan motivasi, dan mendukung agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kehidupan dan langkahku.

Adik-adikku

Aditya Wahyu Hidayat, Muhammad Rizki Kanari, Safwan Nur Hidayat

Yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan kelancaran dalam setiap kehidupanku.

Para Pendidik

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, serta doa

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang sudah diberikan, semoga suatu saat dapat membalas budi baik.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 (Studi di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Dosen Pembimbing Utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat dan

ketulusan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas segala bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah kesibukan dan tanggung jawab yang begitu padat, Ibu tetap meluangkan waktu untuk membaca, mengoreksi, dan memberikan masukan yang sangat berharga bagi penulis.

5. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku Dosen Penguji Utama, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, dan masukan berharga yang telah Bapak berikan selama proses ujian dan penyempurnaan skripsi ini. Setiap arahan dan evaluasi yang Bapak sampaikan tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas karya ilmiah ini, tetapi juga memperluas wawasan serta membentuk pola pikir kritis penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Bapak beserta keluarga.
6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan arahan yang telah Bapak berikan selama masa studi. Dukungan Bapak sangat berarti bagi penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusan, serta terus menjadi pribadi yang menginspirasi bagi seluruh mahasiswa.
7. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, mba Wulan, mba Uki, dan mba Vivi, terimakasih mba atas bantuan, pelayanan, dan dukungan administratif yang telah diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kebaikan hati mba Wulan, mba Uki, dan mba Vivi, sangat membantu memperlancar berbagai proses akademik penulis. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
8. Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (Bapak Ir. M. Abdillah Sjaheru, S.T., M.T., Ir. Angri Hasdiandi, S.T., M.URP., Ir. Yudi Aryanto, S.T., M.T., serta Ibu Ir. Tri Susilowati, S.T., M.T.), terima kasih sudah menerima saya dengan baik dan mengajarkan banyak ilmu serta membantu dalam memperoleh data saat

penyusunan skripsi hingga selesai. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu di balas dengan lebih baik oleh Allah SWT.

9. Sangat Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Hidayatinuri. dan Ibu Ida Farida, S.Sos., M.A. yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya semoga dapat membanggakan dan dapat menjadi anak yang berbakti.
10. Untuk adik-adikku, Didi, Kiki, dan Safwan terimakasih atas segala doa dan dukungannya yang telah diberikan selama ini.
11. Seluruh keluarga besarku, yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung
12. Kepada Rifda Sariyanti Mulyana terima kasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri untuk menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab hidup penulis. Semoga Tuhan yang maha kuasa memberikan takdir yang baik dalam kehidupan kelak.
13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Dec – 17 night photos, Ainur, Miftahul, Ucup, Salman, Reza, Fauzan, Joy, Andi, Moreno, Hamdi dan Daffa yang selalu menemani dan mendukung penulis dari awal perkuliahan sampai penulisan skripsi ini. semoga kita bertemu kembali sebagai orang sukses dengan pencapaian masing-masing.
14. Untuk Athaya, Adepe, Iqlima, Aldi, terimakasih atas kebersamaan serta kebaikan yang mengisi perjalanan dengan cerita dan kenangan yang singkat di akhir masa perkuliahan, akan tetapi menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
15. Teman-teman seperjuangan Ampatra 2022. Terima kasih untuk momen kebersamaan selama kurang lebih 4 empat tahun ini, semoga kita semua dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan dan dapat bermanfaat bagi banyak orang.
16. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Lampung, terimakasih sudah menjadi wadah sekalligus rumah untuk tumbuh dan berkembang dalam kebersamaan.

17. Almamater tercinta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan penulis dalam memberikan banyak pengalaman, pembelajaran, teman, serta perjalanan berharga selama penulis menjalani pendidikan.
18. Dan Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan lainnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis sekali lagi ingin mengucapkan rasa terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta bagi para pembaca.

Bandar Lampung, Mei 2026

Devan Farid Hidayat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Kebijakan Publik	11
2.2.1. Definisi Kebijakan Publik	11
2.2.2. Tahapan Kebijakan Publik.....	13
2.2.3. Teori Implementasi Kebijakan	14
2.3. Efisiensi Anggaran	17
2.4. Instruksi Presiden No. 01 Tahun 2025	18
2.5. Landasan Teori	19
2.5.1. Teori Keuangan Publik (Musgrave)	19
2.5.2. Konsep <i>Value for Money</i> (Mardiasmo).....	20
2.5.3. Konsep Implikasi Kebijakan Publik.....	22
2.6. Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung	24
2.7. Kerangka Berpikir	26

III. METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian	28
3.2. Lokasi Penelitian	29
3.3. Fokus Penelitian	29
3.4. Jenis Sumber Data	29
3.4.1. Data Primer	30
3.4.2. Data Sekunder	30
3.5. Teknik Pengumpulan Data	30
3.5.1. Wawancara	30
3.5.2. Dokumentasi	31
3.6. Teknik Analisis Data	32
3.6.1. Reduksi Data	32
3.6.2. Penyajian Data	32
3.6.3. Penarikan Kesimpulan	32
3.7. Teknik Keabsahan Data	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Gambaran Umum	34
4.1.1. Sejarah Singkat Dinas BMBK Provinsi Lampung	34
4.1.2. Visi dan Misi Dinas BMBK Provinsi Lampung	36
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas BMBK Provinsi Lampung	37
4.1.4. Struktur Organisasi Dinas BMBK Provinsi Lampung	39
4.2. Hasil Penelitian	40
4.2.1. Kebijakan Efisiensi Anggaran Ditinjau dari Aspek Ekonomi	40
4.1.2. Kebijakan Efisiensi Anggaran Ditinjau dari Aspek Efisiensi	47
4.1.3. Kebijakan Efisiensi Anggaran Ditinjau dari Aspek Efektivitas	58
4.2.1. Implikasi Kebijakan Efisiensi Anggaran di Dinas BMBK Lampung	68
4.3. Pembahasan Penelitian	71
4.3.1. Implementasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 pada Dinas BMBK Provinsi Lampung	71
4.3.2. Implikasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada Dinas BMBK Provinsi Lampung	77

V. PENUTUP	82
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu.....	8
2. Informan Penelitian.....	31
3. Data Pagu Anggaran Dinas BMBK Lampung Tahun 2024-2025	48
4. Penerapan Konsep Value for Money di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir.....	27
2. Tahapan Analisis Data.....	32
3. Struktur Organisasi Dinas BMBK Provinsi Lampung.....	39
4. Kegiatan Rapat dilaksanakan di Kantor Dinas, yang sebelumnya di Hotel.....	41
5. Pengawasan oleh aparatur yang tetap terjaln walaupun volume kegiatan dikurangi.	51
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas BMBK Provinsi Lampung.....	53

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Pusat melalui Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 2025 mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2025 yang berisi mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran, kebijakan ini adalah langkah pemerintah guna memaksimalkan pemakaian belanja negara dan menjaga keberlanjutan fiskal. Kebijakan ini menetapkan pemangkasan anggaran belanja negara sebanyak Rp306,7 triliun yang meliputi potongan Rp256,1 triliun oleh kementerian dan lembaga, serta sebesar Rp50,6 triliun dari transfer ke Pemerintah Daerah. Tujuan utamanya adalah untuk menekan pemborosan, meningkatkan kualitas belanja publik, dan memperkuat disiplin fiskal negara. Tetapi, pelaksanaan kebijakan ini kerap kali memunculkan perdebatan, sekelompok masyarakat menyetujui karena dianggap sebagai langkah yang transparan dan bertanggung jawab, sementara sebagian lainnya mengkritik karena dianggap berdampak negatif pada pelayanan publik, seperti pendidikan, bantuan sosial dan kesehatan (Agustina & Herliana, 2025).

Inpres Republik Indonesia No. 01 Tahun 2025 diterbitkan dalam rangka efisiensi belanja negara dan daerah pada tahun anggaran 2025. Instruksi ini memerintahkan para menteri, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, kepala lembaga non-kementerian, para gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan evaluasi anggaran belanja mereka. Pemangkasan anggaran total yang ditetapkan adalah sebesar Rp306,7 triliun yang meliputi anggaran belanja Kementerian atau Lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke Daerah sebesar Rp50,6 triliun. Untuk mencapai efisiensi ini, Menteri atau Pimpinan Lembaga diminta untuk mengidentifikasi rencana efisiensi yang mencakup belanja operasional dan non-

operasional, termasuk belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, subsidi pemerintah, peningkatan infrastruktur, dan penyediaan peralatan dan mesin. selain itu, gubernur dan bupati/wali kota diinstruksikan untuk mengurangi pengeluaran aktivitas yang bersifat seremonial, perjalanan dinas luar, kajian, publikasi, serta *focus group discussion*. Gubernur dan Bupati atau Walikota juga diperintahkan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas sebanyak 50 persen.

Tujuan utama dari Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2025 adalah guna melaksanakan belanja negara dengan lebih efektif dan efisien, serta menahan defisit fiskal yang diperkirakan hingga Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan ini merupakan langkah strategis yang memerintahkan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna menyesuaikan anggaran mereka (Hartono, 2025).

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan sebagai bagian dari layanan publik. Fungsi utamanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, hingga pengawasan pembangunan serta rehabilitasi sarana transportasi darat. Bidang bina marga adalah ujung tombak pelayanan publik di sektor infrastruktur, karena secara langsung berkaitan dengan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat maupun distribusi barang dan jasa (Nur dkk., 2019). Dinas BMBK adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Lampung yang bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan infrastruktur kebinamargaan dan jasa konstruksi di daerah Provinsi Lampung.

Dinas BMBK Provinsi Lampung termasuk salah satu perangkat daerah yang terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi anggaran seperti yang terdapat dalam Inpres No. 01 Tahun 2025. Kepala Bidang Bina Program pada Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Abdillah mengatakan, jika efisiensi anggaran tersebut dilakukan untuk kegiatan yang bersifat seremonial. Berdasarkan data APBD 2025, efisiensi yang dilakukan di dinas ini mencapai sekitar Rp17 miliar, yang sebagian besar menyasar pada pos belanja administratif, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), kegiatan rapat, hingga konsumsi acara. Bahkan, untuk belanja ATK

saja, pemotongan yang dilakukan mencapai 90 persen, sehingga memaksa dinas harus menyesuaikan pola kerja birokrasi dengan sumber daya yang semakin terbatas (Khoiriah, 2025). Namun demikian, pemerintah daerah tetap menegaskan bahwa program pembangunan infrastruktur strategis, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan yang menelan anggaran hingga Rp500 miliar, tidak akan terkena dampak pemangkasan sehingga dapat terus berjalan sesuai target perencanaan.

Selain pos belanja administratif, kebijakan efisiensi anggaran juga menyentuh aspek yang lebih substansial, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Dinas BMBK Provinsi Lampung dari pemerintah pusat. Berdasarkan data terbaru, dari total DAK tahun 2025 sebesar Rp651 miliar, terjadi pemangkasan sekitar Rp32 miliar sehingga dana yang tersisa hanya Rp619 miliar. Pemangkasan DAK ini berdampak cukup serius, karena berimplikasi pada penundaan sebagian program pembangunan jalan yang sebelumnya sudah direncanakan untuk tahun anggaran berjalan (Berdikari.co, 2025). Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung dalam keterangannya menjelaskan bahwasannya efisiensi ini mau tidak mau mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas pembangunan. Program yang dianggap tidak mendesak ditunda, sementara proyek-proyek yang bersifat prioritas tetap dijalankan meskipun dengan anggaran yang terbatas.

Fenomena ini menimbulkan tantangan ganda bagi Dinas BMBK Provinsi Lampung, mereka dipaksa agar menjalankan perintah efisiensi sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 dengan memangkas anggaran pada berbagai pos, baik administratif maupun struktural. Namun di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan infrastruktur jalan dan jembatan terus meningkat, seiring dengan posisi Lampung sebagai penghubung antara Pulau Sumatra Jawa. Pemangkasan perjalanan dinas, misalnya, dapat berdampak pada berkurangnya frekuensi pengawasan dan *monitoring* pembangunan infrastruktur di lapangan. Pemotongan DAK juga berpotensi menunda perbaikan jalan di sejumlah wilayah yang sebenarnya sudah mendesak. Dengan demikian, efisiensi anggaran yang dilakukan, meskipun bertujuan baik

untuk meningkatkan disiplin fiskal dan efektivitas belanja daerah, tetap menimbulkan dilema terhadap kualitas pelayanan publik di bidang infrastruktur.

Dalam menjalankan tugas pokok, Dinas BMBK Provinsi Lampung didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD pada dasarnya adalah perangkat kebijakan yang berfungsi selaku sarana untuk mengembangkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, APBD juga berperan dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mendapat persetujuan dari DPRD dan disahkan lewat peraturan daerah. (Azahra & Lubis, 2021).

Pada teori keuangan publik Musgrave (1989), membagi peran fiskal pemerintah menjadi tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua fungsi ini secara teoritis serta praktis menjadi pilar dasar dalam pelaksanaan kebijakan fiskal di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketiganya menjadi kerangka dasar dalam memahami bagaimana pemerintah menggunakan instrumen anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan.

Fungsi alokasi menekankan bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya publik secara optimal guna menciptakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. Pada konteks efisiensi anggaran di Dinas BMBK Provinsi Lampung, fungsi alokasi tampak pada pemangkasan belanja yang dianggap tidak langsung mendukung pelayanan publik, seperti perjalanan dinas, rapat, atau pengadaan ATK. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang secara langsung dinikmati faedahnya oleh masyarakat. Akan tetapi, pada sisi lain, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan efisiensi ini tidak mengurangi kualitas koordinasi dan pengawasan lapangan, yang justru merupakan elemen penting dari pelaksanaan proyek infrastruktur.

Fungsi distribusi berhubungan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial melalui kebijakan anggaran. Pemangkasan Dana

Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp32 miliar di Dinas BMBK Lampung berpotensi menunda beberapa program pembangunan jalan di wilayah tertentu (Berdikari.co, 2025). Hal ini menimbulkan dilema dari sisi distribusi, sebab penundaan tersebut dapat memperlebar kesenjangan pelayanan infrastruktur antar wilayah. Dalam kerangka Musgrave, efisiensi anggaran seharusnya tetap memperhatikan prinsip keadilan distributif, sehingga pemangkasan tidak mengorbankan akses masyarakat di daerah terpencil terhadap infrastruktur dasar yang memadai.

Fungsi stabilisasi menekankan peran pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres No. 01 Tahun 2025 bertujuan guna menjaga defisit fiskal tetap terkendali dan memastikan keberlanjutan fiskal negara. Di tingkat daerah, implementasi kebijakan ini, termasuk di Provinsi Lampung, menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal APBD. Dengan penghematan anggaran sebesar Rp17 miliar di Dinas BMBK, pemerintah daerah diharapkan tetap dapat menjalankan program prioritas infrastruktur tanpa menimbulkan beban fiskal baru yang bisa mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Kebijakan efisiensi ini juga dapat dikaitkan melalui pendekatan *Value for Money* yang menekankan beberapa indikator utama, yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo dalam Dua, 2023). Dari sisi ekonomi, pemangkasan perjalanan dinas, rapat, dan belanja alat tulis menunjukkan upaya penghematan agar tidak terjadi pemborosan pada pengeluaran yang dianggap seremonial. Dari sisi efisiensi, Dinas Bina Marga Bina Konstruksi dituntut untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan proyek dengan biaya perjalanan dinas yang lebih terbatas, artinya harus ada penyesuaian pola kerja dan inovasi dalam monitoring, sementara dari sisi efektivitas, tantangan terbesarnya adalah menjaga agar pemangkasan anggaran tidak menurunkan kualitas hasil pembangunan infrastruktur.

Kebijakan efisiensi anggaran adalah salah satu upaya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks suatu negara, efisiensi memiliki peran yang sangat vital karena peningkatan efisiensi di berbagai sektor industri dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat daya saing di pasar internasional, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas demi

tercapainya pembangunan berkelanjutan (Pramesti, *et al*, 2025). Selain itu konsep efisiensi anggaran diartikan sebagai upaya mengurangi pemborosan dalam pengeluaran dan mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor prioritas yang memberikan dampak ekonomi tinggi (Musgrave dalam Salman & Iqbal, 2025). Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, efisiensi merupakan bagian dari prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara.

Implikasi kebijakan publik merupakan konsekuensi, secara langsung dan tidak langsung, dari kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam setiap tahap siklus kebijakan. Ia mencakup dampak yang terlihat maupun tersembunyi, serta dipengaruhi oleh kapasitas institusi, kemauan politik, norma, dan konteks sosial. Dengan demikian, implikasi kebijakan tidak hanya menilai pencapaian tujuan formal, tetapi juga menyangkut akuntabilitas, keberlanjutan, distribusi manfaat, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Menurut Salman & Iqbal (2025), Efisiensi anggaran dapat meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi hanya jika disertai dengan reformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan Bappenas (2022) menunjukkan bahwa pemotongan belanja yang tidak didasari oleh analisis kinerja yang cermat justru dapat merugikan kualitas layanan dasar, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, efisiensi anggaran seharusnya didasarkan pada pencapaian hasil dan manfaat, bukan hanya sekadar pengurangan nominal.

Penelitian mengenai efisiensi anggaran dan pengelolaan APBD telah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian Huseini dkk. (2019), menyoroti manajemen kinerja sebagai instrumen peningkatan efisiensi anggaran, sementara Yulianti (2025), membahas dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang kompleks dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Namun, masih sangat sedikit penelitian yang secara spesifik menelaah implementasi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 yang berdampak langsung terhadap belanja operasional dan transfer ke daerah. Pada Provinsi Lampung sendiri, penelitian mengenai efisiensi anggaran relatif terbatas, padahal Dinas BMBK memiliki posisi strategis untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sangat vital bagi mobilitas masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang penting untuk diisi.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implikasi kebijakan efisiensi anggaran pada Dinas BMBK Provinsi Lampung menggunakan perspektif Teori Keuangan Publik khususnya Prinsip *Value for Money*. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul: ***“Analisis Implementasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 (Studi di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung)”***.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana implikasi kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk teridentifikasinya implikasi kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan efisiensi anggaran dengan perspektif Teori Keuangan Publik Musgrave, khususnya dalam menghubungkan konsep *Value for Money* yang terdiri dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan praktik pengelolaan anggaran daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bahan masukan dalam menyusun strategi implementasi efisiensi anggaran yang lebih efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis agar pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan efisiensi fiskal dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah aspek penting yang harus dilakukan seorang peneliti, kegiatan ini bertujuan untuk menelusuri berbagai penelitian yang sebelumnya dilakukan, agar dapat diidentifikasi posisi penelitian yang sedang dikerjakan. Selain itu, kajian pustaka juga berguna untuk menghindari adanya kemiripan atau duplikasi penelitian, baik yang disengaja maupun yang terjadi secara tidak sengaja. Adapun beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis & Judul Penelitian	Teori & Metode	Hasil Penelitian
1	Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran BOS/BOP dan Implikasinya terhadap Kualitas Layanan Pendidikan di RA Raudhatul Amin (Safitri dkk., 2025)	Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. teori bahwa efisiensi anggaran BOS/BOP mempengaruhi kualitas layanan pendidikan	Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan pergeseran prioritas pendanaan dan pembatasan skala kegiatan. Namun pengadaan alat peraga yang mengedukasi dan wadah pembelajaran baru menjadi dibatasi. Langkah adaptasinya adalah pemanfaatan dana infaq secara optimal, pengembangan media pembelajaran berbasis daur ulang, penyesuaian prioritas program sesuai skala kebutuhan, serta penguatan kerja sama dengan orang tua dan lembaga mitra eksternal.

No	Nama Penulis & Judul Penelitian	Teori & Metode	Hasil Penelitian
2	Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah di BAPPEDA Muara Enim (Walizi, 2025)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kebijakan efisiensi anggaran diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan dana sehingga penggunaannya lebih efektif dan sesuai dengan sasaran dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan daerah.	Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan perubahan prioritas alokasi dana, di mana hanya program strategis yang mendapatkan anggaran penuh. Efisiensi dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas layanan publik dengan menggunakan strategi prioritas, digitalisasi sistem administrasi, penguatan kapasitas SDM, serta penggunaan teknologi dan manajemen proyek yang ketat.
3	Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Mekanisme Pencairan Dana Pihak Ketiga Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung (Pane dkk., 2023)	Metode pendekatan kuantitatif. Alat analisisnya menggunakan regresi logistik melalui program SPSS. Teori Institutional Isomorphism dan teori Sistem Pengendalian Internal	Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal, yang didalamnya adalah Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Prosedur, Pemantauan, serta Informasi dan Komunikasi, penting untuk mekanisme pencairan anggaran di Dinas BMBK Provinsi Lampung. Meskipun sudah efektif, ada kendala, seperti penolakan dana akibat kesalahan data rekening. Sistem ini juga dipengaruhi oleh dua hal: kewajiban mematuhi peraturan pemerintah (<i>coercive</i>) dan kesadaran para pegawai akan pentingnya pengendalian internal (<i>normative</i>).

No	Nama Penulis & Judul Penelitian	Teori & Metode	Hasil Penelitian
4	Pengawasan Kepala Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Dalam Melakukan Kegiatan Rutin Perawatan Jalan Kota Bandar Lampung di Era Covid-19 (J, Setya & Farida, 2022)	Penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori supervisi atau pengawasan	Pengawasan kegiatan perawatan jalan rutin tetap menjadi prioritas. Namun, jumlah pekerja menurun akibat pandemi Covid-19. Faktor penghambat pengawasan meliputi akses jalan yang sulit, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap aturan kerja, dan intimidasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Faktor pendukungnya adalah anggaran yang mulai kembali normal dan mencukupi, SDM yang memadai, dan adanya pemeriksaan kesehatan rutin bagi staf.
5	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Kasus Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kabupaten Magelang) (Dwifarchan & Sulistiyanti, 2023)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas, efisiensi, dan anggaran	BPPKAD Kabupaten Magelang periode 2017–2021 dinilai efektif (84–94%) dan efisien (4,5–67%) dalam pengelolaan anggaran, dengan rata-rata efisiensi 47%. Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan anggaran sudah baik dan mendekati target.

Sumber: *data diolah peneliti, 2025*

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa fokus utama kajian sebelumnya masih beragam, seperti efisiensi anggaran dalam sektor Pendidikan dan implikasi kebijakan efisiensi terhadap perencanaan pembangunan daerah. Selain itu penelitian terdahulu yang dilakukan di Dinas BMBK Provinsi Lampung lebih menganalisa sistem pengendalian internal dalam mekanisme pencairan dana, maupun pengawasan perawatan infrastruktur jalan pada masa pandemi. Keseluruhan penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami berbagai dimensi implementasi kebijakan efisiensi. Namun demikian, belum ditemukan

penelitian yang secara khusus menelaah implementasi Instruksi Presiden No. 01 Tahun 2025, terutama dalam konteks sektor infrastruktur strategis di daerah. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai perbedaan yang terlihat jelas karena berfokus pada analisis implementasi kebijakan efisiensi anggaran di Dinas BMBK Provinsi Lampung dengan menggunakan pendekatan Teori Keuangan Publik Musgrave, khususnya konsep *Value for Money*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kesenjangan penelitian yang ada sekaligus memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan kajian efisiensi anggaran di tingkat daerah.

2.2. Kebijakan Publik

2.2.1. Definisi Kebijakan Publik

Menurut David Easton (1957), kebijakan dipahami sebagai dampak dari kegiatan pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang lahir tak terlepas dari keputusan pemerintah. Nugroho menjelaskan bahwa kebijakan merupakan keputusan yang ditetapkan pemerintah, sebagai rencana dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai. Pada dasarnya, kebijakan publik juga berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat mengikat dan memaksa (Pramono, 2020).

Kebijakan dipahami juga dengan serangkaian tindakan, tujuan, serta pernyataan pemerintah terkait persoalan tertentu. Hal ini mencakup tahap-tahap yang sudah, sedang, atau bahkan tidak berhasil dilaksanakan, beserta pemaparan yang disampaikan pemerintah mengenai sesuatu yang terjadi ataupun tidak. Istilah kebijakan juga kerap dikaitkan dengan tujuan, program keputusan, peraturan perundang-undangan, ketentuan, usulan, hingga rancangan besar yang disusun untuk mengarahkan penyelesaian suatu masalah.

Istilah publik pada pengertian kebijakan publik bisa dipahami jika dibandingkan dengan istilah privat. Secara historis, konsep ini telah muncul sejak peradaban Romawi Kuno. Dalam tradisi bangsa Romawi menggunakan istilah *res-publica* untuk publik dan *res-privata* untuk privat (Handoyo, 2012). Berdasarkan kajian sejarah Romawi, menjelaskan bahwa istilah privat lebih mengarah pada individu atau personal, sedangkan publik mengacu pada

kepentingan komunitas atau negara. Menurut Parsons dalam Handoyo (2012), Sektor publik tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial. Meskipun dalam beberapa hal sektor ini dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, fokus utamanya adalah peningkatan kesejahteraan sosial. Apabila tujuan utamanya adalah kesejahteraan sosial, maka sektor publik dapat digolongkan sebagai sektor nirlaba. Ciri-cirinya antara lain, tidak berorientasi pada laba, lebih menekankan pada fungsi pelayanan, memiliki keterbatasan yang lebih luas dalam merumuskan tujuan dan strategi, sangat bergantung pada dukungan klien atau masyarakat dalam memperoleh sumber daya finansial, didominasi oleh tenaga profesional, manajemen puncak tidak memikul tanggung jawab maupun memperoleh imbalan finansial yang setara dengan sektor privat, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat melalui mekanisme politik, dengan tradisi kontrol manajemen yang relatif lebih lemah.

Pengertian kebijakan publik menurut Carl Freadrich dalam Pramono (2020), mengartikan bahwasannya “Kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan dan aktivitas yang telah dirancang oleh perorangan, sekelompok atau pemerintah pada lingkungan tertentu, yang mana ditemukan beberapa kendala serta kesempatan di mana kebijakan itu dicanangkan agar dapat mengatasi permasalahan yang dimaksud”. Selain itu kebijakan publik juga berarti “Penempatan norma-norma secara sah dan paksa terhadap seluruh masyarakat” (Easton, 1953). Selain itu definisi lain menjelaskan bahwasannya kebijakan publik secara umum memiliki dimaknai sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak dilakukan oleh pemerintah (Dye, 1972).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian keputusan, langkah, maupun strategi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya mencakup apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga apa yang dipilih untuk tidak dilakukan, karena keduanya sama-sama memberikan dampak bagi masyarakat. Sifat kebijakan publik berbeda dengan kebijakan privat karena berorientasi pada kepentingan bersama, berlandaskan hukum yang bersifat mengikat, serta

bertanggung jawab kepada publik melalui mekanisme politik dan administrasi. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai instrumen negara dalam mengalokasikan nilai, menyelesaikan masalah, dan mengarahkan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan sosial.

2.2.2. Tahapan Kebijakan Publik

Menurut pendapat para ahli, lahirnya sebuah kebijakan publik tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian proses atau langkah yang cukup panjang. Beberapa ilmuwan politik kemudian merumuskan tahapan perumusan kebijakan publik dengan tujuan agar proses tersebut lebih mudah dipahami dan dikaji. Anderson membagi proses perumusan kebijakan pada beberapa tahapan, yakni penetapan agenda, formulasi kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Menurut Ripley, tahapan kebijakan berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu penetapan agenda, pengesahan, perumusan program kebijakan, pelaksanaan program, serta mencakup penilaian dampak dan tindakan lanjutan, termasuk keputusan mengenai masa depan kebijakan maupun program tersebut. Selaras dengan itu, Thomas R. Dye menguraikan proses kebijakan menjadi beberapa bagian utama, yakni identifikasi kebijakan, penetapan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi kebijakan. (Septiana dkk., 2023). Berdasarkan pandangan para ahli, proses kebijakan publik pada dasarnya dapat dibagi ke dalam empat tahapan utama, yaitu:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Di tahap ini, berbagai permasalahan publik yang muncul di masyarakat diidentifikasi, dipilah, dan ditentukan mana yang layak untuk termasuk ke dalam agenda kebijakan. Tidak semua isu dapat menjadi prioritas, sehingga diperlukan ketelitian dan analisis mendalam dalam menilai urgensi permasalahan. Tahapan ini sangat penting karena menentukan arah kebijakan yang akan dibahas dan diambil oleh pemerintah.

2. Tahap perumusan kebijakan

Setelah suatu masalah masuk dalam agenda, langkah berikutnya adalah merumuskan kebijakan. Pada tahap ini, masalah dibahas bersama oleh aktor-aktor kebijakan, baik pejabat pemerintah, legislatif, maupun pihak-

pihak yang berkepentingan. Dari pembahasan tersebut disusun berbagai alternatif solusi yang mungkin dapat diterapkan. Tahapan ini sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, kepentingan kelompok, serta dinamika kekuasaan, sehingga hasil perumusan kebijakan merupakan kompromi antara aspek teknis dan kepentingan politik.

3. Tahap implementasi

Tahap implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan dan dirumuskan sebelumnya. Keputusan yang telah ditetapkan kemudian dijalankan sebagai program konkret untuk menyelesaikan masalah publik. Pelaksana kebijakan pada tahap ini biasanya adalah birokrasi dan aparatur pemerintah di tingkat operasional. Implementasi sangat menentukan apakah kebijakan benar-benar dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, karena di sinilah kebijakan berhadapan langsung dengan masyarakat.

4. Tahap evaluasi kebijakan

Evaluasi dilaksanakan guna menilai seberapa jauh kebijakan yang sudah diimplementasikan berhasil menyelesaikan permasalahan. Dalam tahap ini, efektivitas, efisiensi, serta dampak kebijakan dianalisis secara mendalam, termasuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam proses implementasi. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan pertimbangan penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada, mengembangkan kebijakan baru, atau bahkan menghentikan kebijakan apabila dianggap tidak relevan lagi.

2.2.3. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting setelah perumusan kebijakan publik. Tahap ini menjadi faktor penentu apakah sebuah kebijakan dapat berjalan efektif atau tidak. Bahkan, bila digambarkan dalam persentase, implementasi kebijakan berkontribusi sekitar 60 persen, sedangkan perumusan dan evaluasi kebijakan masing-masing hanya sekitar 20 persen, yang dapat diartikan bahwa kebijakan yang dirancang sebaik apapun tidak akan lebih dari sekadar dokumen jika tidak diimplementasikan dengan baik (Maulana & Nugroho, 2019).

DeLeon & DeLeon dalam Sirajuddin (2014) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik dipandang melalui tiga gelombang pendekatan. Pertama, pada dekade 1970-an, implementasi dipahami sebagai persoalan yang muncul dalam proses penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan. Pada fase ini, kajian implementasi sangat erat kaitannya dengan kajian mengenai penetapan keputusan di sektor publik. Kedua, di tahun 1980-an, berkembang pendekatan “*top-down*” yang menekankan peran birokrasi dalam melaksanakan keputusan politik yang telah ditetapkan. Ketiga, pada era 1990-an, muncul gagasan bahwa perilaku para pelaksana kebijakan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi.

Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan tindakan administrasi yang bisa dikaji di level program tertentu. Tahapan implementasi dapat berlangsung ketika tujuan serta target sudah ditentukan, program kerja telah dirancang, dan dukungan dana telah tersedia serta dialokasikan guna mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, Van Meter & Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan yaitu, serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah ataupun pihak swasta, baik secara perorangan dan kolektif, dengan tujuan agar mewujudkan apa yang sudah ditentukan pada suatu kebijakan. (Wibawa dkk., 1994).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting setelah perumusan kebijakan yang sangat memastikan keberhasilan dari suatu kebijakan. Implementasi dipandang sebagai faktor dominan yang menyumbang paling besar terhadap efektivitas kebijakan. Perkembangan pemikiran mengenai implementasi menunjukkan bahwa awalnya dipahami sebagai persoalan antara kebijakan dan pelaksanaannya, kemudian berkembang dengan menekankan peran birokrasi melalui pendekatan dari atas ke bawah, akhirnya menyoroti pentingnya perilaku aktor pelaksana dalam menentukan keberhasilan. Proses implementasi dapat berjalan jika program, sasaran, tujuan, serta sumber daya telah disiapkan dengan baik.

Dengan memahami definisi dan esensi implementasi kebijakan publik, maka penting untuk menelaah model implementasi kebijakan. Terdapat berbagai pendekatan implementasi kebijakan publik menurut pendapat para ahli, salah satunya adalah model pendekatan implementasi kebijakan publik menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011). Menurut Edwards III, implementasi kebijakan dilihat sebagai langkah yang bersifat tidak kaku, yang mana berbagai faktor saling berhubungan dan memengaruhi arahnya pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu diperlihatkan agar dapat dipahami sejauh mana pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi.

Edward III menerangkan bahwasannya ketercapaian dari tujuan implementasi kebijakan sangat terpengaruh oleh empat variabel utama yang saling terkait. (1) komunikasi, yakni kejelasan dalam mengantarkan isi kebijakan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran. Tanpa komunikasi yang baik, tujuan dan target kebijakan berpotensi mengalami kegagalan sehingga menyulitkan implementor dalam melaksanakan program secara tepat. (2) sumber daya, yang terdiri dari sumber daya manusia ataupun sumber daya finansial. Meskipun kebijakan telah disusun dengan baik dan dikomunikasikan secara jelas, keterbatasan tenaga pelaksana yang kompeten atau minimnya dukungan anggaran akan membuat implementasi tidak berjalan efektif. (3) disposisi, yang berkaitan dengan sikap, karakter, dan komitmen implementor. Integritas, kejujuran, serta kesediaan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan arah yang telah ditentukan akan sangat menentukan keberhasilan implementasi. (4) struktur birokrasi, yakni pola organisasi yang mengatur jalannya implementasi kebijakan. Tatanan birokrasi yang disempurnakan dengan standar operasional prosedur yang jelas akan mendukung konsistensi pelaksanaan, sementara struktur yang terlalu panjang dan berbelit cenderung menimbulkan prosedur yang rumit sehingga menghambat fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, keempat variabel ini menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan bisa terlaksana secara efektif sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2.3. Efisiensi Anggaran

Efisiensi secara umum dapat diartikan sebagai ketepatan dalam mengerjakan atau menghasilkan sesuatu tanpa membuang waktu, tenaga, maupun biaya, serta kemampuan untuk melaksanakan tugas secara cermat, tepat, dan bermanfaat. Secara umum, efisiensi dapat dipahami sebagai pemanfaatan sumber daya seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang maksimal. Konsep ini berangkat dari asumsi bahwa tujuan yang hendak dicapai telah ditetapkan dengan benar, sehingga yang menjadi fokus adalah menemukan cara paling efektif untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Halim dalam Khadlirin dkk. (2021), mendefinisikan efisiensi sebagai tolak ukur yang menilai kesesuaian antara masukan dan hasil yang diperoleh. Tingkat efisiensi bisa diukur dengan melihat hubungan antara anggaran aktual yang dikeluarkan dengan anggaran standar yang telah ditentukan. Dengan demikian, efisiensi dapat dipahami sebagai rasio antara masukan dan keluaran yang dihasilkan.

Anggaran dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang berisi harapan, rencana, maupun perkiraan mengenai apa yang akan terjadi dalam suatu periode tertentu di masa depan. Anggaran juga merupakan bentuk pernyataan resmi yang memuat proyeksi serta rencana atas kejadian-kejadian yang diperkirakan berlangsung pada periode yang telah ditetapkan. (Fahrianta & Carolina, 2016). Menurut Anthony & Govindarajan dalam Nasir (2010), anggaran dipahami sebagai sebuah rencana yang dituangkan secara kuantitatif, umumnya dipaparkan dalam bentuk satuan moneter, dan disusun untuk periode di masa depan.

Efisiensi anggaran dalam ranah kebijakan publik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mewujudkan tujuan pemerintahan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pencapaian hasil yang maksimal melalui pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Dalam administrasi publik, efisiensi mencakup upaya meminimalkan pemborosan, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan mekanisme kerja. (Utami, 2023). Pemanfaatan aset yang

dikelola secara tepat penting pada administrasi publik, sebab hal ini memengaruhi kemampuan lembaga publik dalam melayani Masyarakat. Melalui pengelolaan yang efisien, lembaga dapat memaksimalkan alokasi sumber daya, menghindari pemborosan dana dan waktu, serta menjaga kelangsungan layanan (Utami, 2023).

2.4. Instruksi Presiden No. 01 Tahun 2025

Inpres RI No. 01 Tahun 2025 dikeluarkan dalam rangka mengarahkan efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Ketetapan ini ditujukan kepada para menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah, serta aparat penegak hukum untuk melakukan peninjauan kembali terhadap anggaran sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintah menetapkan target efisiensi belanja sebanyak Rp306,7 triliun, terdiri atas belanja Kementerian atau lembaga dan transfer ke pemerintahan daerah. Lebih lanjut, instruksi ini menekankan agar setiap kementerian/lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi melalui penyesuaian pada belanja operasional maupun non-operasional, serta mengajukan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan. Di tingkat daerah, gubernur dan bupati/wali kota diminta membatasi pengeluaran yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, dan kegiatan non-produktif lainnya, serta mengutamakan belanja yang berorientasi pada pelayanan publik.

Konsep efisiensi dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diwujudkan melalui pembatasan pengeluaran yang tidak memiliki dampak nyata dan pengalihan fokus anggaran pada program prioritas. Efisiensi diarahkan terutama pada belanja operasional seperti pemeliharaan, perjalanan dinas, seminar, kajian, hingga pengadaan barang, dengan pengecualian pada belanja pegawai dan bantuan sosial. Pemerintah juga membatasi honorarium, studi banding, serta hibah yang tidak selektif, dan menegaskan bahwa alokasi anggaran harus lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar pemerataan anggaran antar-perangkat daerah. Dengan demikian, efisiensi dalam Inpres ini tidak hanya bermakna penghematan

anggaran, tetapi juga optimalisasi belanja agar setiap rupiah yang dikeluarkan berkontribusi langsung pada kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.

2.5. Landasan Teori

2.5.1. Teori Keuangan Publik (Musgrave)

Keuangan publik dipahami sebagai ilmu yang mengkaji beragam kegiatan ekonomi pemerintah ketika berfungsi sebagai suatu kesatuan organisasi (Musgrave, 1989). Keuangan publik menitikberatkan kajiannya pada bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya serta mendistribusikan pendapatan. Selain itu, disiplin ini juga membahas mengenai aktivitas belanja negara dan perkembangan penerimaan pemerintah. (Jaelani, 2014). Menurut Plehm (dalam Jaelani, 2014), keuangan publik adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah. Rossen (2002), menjelaskan bahwa keuangan publik merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas pemerintah terkait perpajakan dan pengeluaran. Dalam kajian keuangan publik, isu pokok yang dibahas sebenarnya bukan sekadar persoalan keuangan, meskipun memiliki keterkaitan dengannya, melainkan lebih menekankan pada masalah sumber daya riil.

Menurut Aronson (1985), keuangan publik adalah kajian mengenai aktivitas keuangan yang dilakukan oleh pemerintah maupun otoritas publik, yang meliputi bagaimana pemerintah melakukan pengeluaran serta teknik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Ruang lingkup keuangan publik mencakup beberapa hal, yaitu: pertama, menjadi bagian dari kajian ilmu ekonomi; kedua, terbatas pada bidang pemerintahan dan politik; ketiga, berkaitan dengan pihak-pihak yang harus membuat keputusan terhadap suatu isu tertentu; dan keempat, berhubungan dengan masyarakat yang akan terdampak dari keputusan politik maupun ekonomi tersebut.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli, keuangan publik dapat dipahami sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang didalamnya menjelaskan mengenai aktivitas keuangan pemerintah, khususnya terkait penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Fokus utama disiplin ini adalah bagaimana pemerintah

mengelola sumber daya, melakukan alokasi untuk penyediaan barang dan jasa publik, serta mendistribusikan pendapatan demi tercapainya keadilan sosial. Keuangan publik juga mencakup analisis mengenai proses politik dan kelembagaan dalam pengambilan keputusan anggaran, serta dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian dan masyarakat.

Musgrave (1989), Menguraikan fungsi dari keuangan publik menjadi tiga bagian yaitu: Pertama, fungsi alokasi, yaitu peran pemerintah dalam menyesuaikan penggunaan sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa publik. Kedua, fungsi distribusi, yaitu peran anggaran dalam mengatur pemerataan pendapatan dan kekayaan melalui pengeluaran serta penerimaan negara yang memiliki dampak sosial dan ekonomi. Ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu peran pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi dengan memastikan tingkat pemakaian faktor produksi tetap signifikan sekaligus menjaga kestabilan nilai mata uang.

2.5.2. Konsep *Value for Money* (Mardiasmo)

Value for Money adalah konsep yang mengelola organisasi sektor publik dengan berdasar pada tiga komponen yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi erat kaitannya dengan biaya untuk memperoleh satuan *input*, yang sepatutnya didapatkan dengan harga rendah, yaitu harga yang sesuai dengan pasar (Mahmudi 2011). Ekonomi berkaitan dengan hubungan antara pasar dan *input*, khususnya biaya *input*, yang mencerminkan praktik efisiensi melalui pengelolaan yang cermat guna mencegah terjadinya pemborosan. (Mardiasmo, 2009). Sebuah aktivitas dapat disebut ekonomis apabila mampu menekan atau menghindarkan pengeluaran yang tidak diperlukan.

Efisiensi berhubungan dengan keterkaitan antara *output* berupa barang maupun jasa yang dihasilkan dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya (Mahmudi, 2011). Efisiensi dapat diartikan sebagai kemampuan memperoleh *output* maksimum dari *input* tertentu, atau sebaliknya, memanfaatkan *input* sekecil mungkin untuk menghasilkan *output* yang diharapkan. Menurut Mardiasmo (2009), suatu aktivitas dinilai ekonomis apabila mampu menekan atau menghilangkan biaya yang tidak diperlukan.

Dengan demikian, efisiensi erat kaitannya dengan rasio antara *output* dan *input* yang digunakan, yang juga berkorelasi dengan konsep produktivitas. Sebuah kegiatan dapat dianggap efisien apabila hasil yang diperoleh dicapai melalui pemanfaatan sumber daya dan dana secara minimal, dengan pengeluaran yang tepat sasaran.

Efektivitas erat kaitannya dengan keterhubungan antar hasil berupa barang/jasa yang diproduksi dengan aset yang digunakan untuk mencapainya. Efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran kemampuan dalam mewujudkan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, di mana tingkat pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh target yang ingin dicapai sesuai kapasitas yang tersedia. Dengan demikian, efektivitas menunjukkan seberapa jauh hasil program sesuai dengan target yang ditentukan. Menurut Mardiasmo (2009), efektivitas merupakan tolak ukur guna menilai keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan melalui perbandingan antara keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

Sedangkan menurut Zhao (2023), konsep *Value for Money* memiliki empat komponen utama yang dijadikan standar dalam menilai kinerja suatu kebijakan atau proyek publik yaitu *economy*, *efficiency*, *effectiveness*, dengan tambahan *equity*. Pertama, *economy* yang menekankan pada penggunaan sumber daya dengan biaya serendah mungkin sehingga tercapai efisiensi pengeluaran pemerintah. Kedua, *efficiency* yang melihat hubungan antara *input* dan *output*, di mana suatu proyek dinilai baik apabila mampu menghasilkan layanan atau infrastruktur dengan mutu yang memadai menggunakan sumber daya yang terbatas. Ketiga, *effectiveness* yang berfokus pada pencapaian tujuan dan hasil akhir, misalnya kesesuaian *output* dengan kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan manfaat yang dihasilkan. Keempat, *equity* yang menekankan aspek keadilan, yaitu penggunaan anggaran publik harus mampu memberikan kualitas layanan yang setara bagi semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi maupun kompromi terhadap mutu layanan. Dengan demikian, penerapan konsep *Value for Money* tidak hanya berorientasi pada efisiensi biaya, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana kebijakan publik mampu memberikan manfaat nyata dan merata kepada masyarakat. Hal ini

menjadikan keempat komponen tersebut sebagai indikator penting dalam memastikan tercapainya nilai optimal dari pengeluaran pemerintah.

Value for Money menuntut agar organisasi sektor publik dapat menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara bersamaan (Anggoro, dkk., 2022). Konsep ini dipandang sebagai sistem pengukuran kinerja yang objektif, menyeluruh, representatif, serta aplikatif. *Value for Money* juga dianggap sebagai instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengukuran kinerja yang optimal. Lebih jauh, keberhasilan dalam pengelolaan anggaran yang efektif tidak dapat dilepaskan dari peran mekanisme pengawasan serta dukungan sarana pendukung yang memadai (Purnomo & Putri, 2018).

Dengan demikian, prinsip *Value for Money* menjadi kerangka penting dalam menilai sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran dapat diterapkan secara efektif di Dinas BMBK Provinsi Lampung. Melalui perspektif ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, penelitian ini berupaya melihat apakah pemotongan dana yang dilakukan berdasarkan Inpres No. 01 Tahun 2025 benar-benar mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian bisa menggambarkan secara komprehensif tentang penerapan efisiensi anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sekaligus menilai konsistensinya dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan publik yang baik.

2.5.3. Konsep Implikasi Kebijakan Publik

Implikasi ialah keterlibatan atau keadaan terlibat, serta sesuatu yang terkandung atau akibat yang tersirat. Dalam konteks ini, implikasi merujuk pada konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari suatu hal, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Dengan kata lain, implikasi adalah hasil yang tidak langsung terlihat namun tetap ada dan perlu dipertimbangkan. Memahami implikasi sangat penting dalam menganalisis suatu fenomena atau mengambil keputusan, karena ia menyingkapkan konsekuensi yang mungkin tersembunyi. Implikasi kebijakan harus

mempertimbangkan kapasitas kebijakan (*policy capacity*) yaitu kemampuan institusi publik dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dengan efektif.

Implikasi kebijakan publik bukan hanya dampak yang muncul, tetapi juga harus diantisipasi bagaimana desain kebijakan memengaruhi keberhasilan implementasi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal (Mukherjee, *et al.*, 2021). Implikasi kebijakan publik harus dilihat dalam konteks siklus kebijakan (*agenda setting*, formulasi, adopsi, implementasi, evaluasi), di mana kemauan politik dapat memengaruhi setiap tahapnya.

Dampak kebijakan (*policy implications*) termasuk bagaimana norma politik, ideologi, dan tekanan sosial mendikte pelaksanaan kebijakan, bukan hanya desainnya (Manazir, 2023). implikasi kebijakan publik juga merupakan konsekuensi langsung & tidak langsung dari kebijakan, bagaimana proses pembuatan kebijakan membentuk konten kebijakan, dan pentingnya variabel seperti institusi, ide, kekuasaan, dan konteks. Implikasi publik juga terkait dengan distribusi efek kebijakan, siapa yang mendapat manfaat dan siapa yang dirugikan (Carney, 2012).

Dampak kebijakan merupakan perubahan atau konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari penerapan suatu keputusan atau tindakan pemerintah. Dampak ini dapat terlihat pada kualitas layanan publik, kemampuan lembaga dalam menjalankan program, serta kapasitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Ketika kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, konsekuensi yang muncul biasanya berupa penyesuaian pada layanan yang diberikan kepada masyarakat, pengurangan ruang fiskal untuk pengembangan program, serta terhambatnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (Yuliati, 2025). Semua perubahan tersebut mencerminkan bagaimana sebuah kebijakan mempengaruhi kinerja organisasi dan hasil yang diterima masyarakat.

Kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah, kebijakan ini memiliki beberapa dampak utama, baik positif ataupun negatif, seperti, pengurangan pemborosan, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, penataan ulang skala prioritas dan

pembangunan, pemangkasan layanan publik, penundaan atau pembatalan proyek strategis, dan potensi menurunnya kepuasan masyarakat (Putri dkk., 2025).

Secara keseluruhan, implikasi kebijakan mencakup konsekuensi langsung maupun tidak langsung yang muncul dari proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan, termasuk bagaimana kapasitas institusi, konteks politik, ideologi, serta dinamika sosial memengaruhi efektivitas kebijakan. Dalam konteks efisiensi anggaran, implikasi yang timbul tidak hanya berkaitan dengan perubahan pada kualitas layanan publik dan kinerja aparatur, tetapi juga mencakup penataan ulang prioritas pembangunan, peningkatan akuntabilitas, serta risiko pengurangan layanan dan terhambatnya pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, implikasi kebijakan perlu dipahami sebagai rangkaian dampak yang memengaruhi keseluruhan siklus kebijakan dan distribusi manfaat maupun kerugian bagi masyarakat.

2.6. Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan jasa konstruksi. Tugas utama dinas ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pengawasan jalan dan jembatan yang menjadi sarana vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang maupun jasa. Keberadaan Dinas Bina Marga Bina Konstruksi tidak hanya sebatas institusi teknis, melainkan juga sebagai ujung tombak pelayanan publik di bidang infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran aktivitas ekonomi serta konektivitas antarwilayah (Nur dkk., 2019).

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah, Dinas BMBK melaksanakan fungsi berdasarkan APBD. APBD pada hakikatnya adalah instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi meningkatkan pelayanan publik, mendorong kesejahteraan rakyat, dan menerapkan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, setiap keputusan pengelolaan anggaran di Dinas BMBK Provinsi

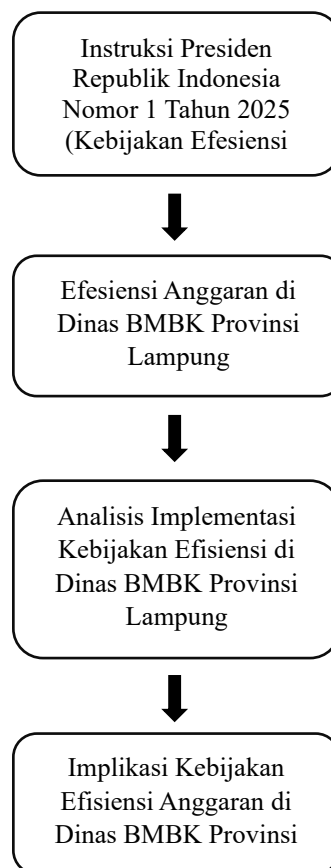
Lampung mempunyai konsekuensi terhadap capaian pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat (Azahra & Lubis, 2021). Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang sesuai dengan Inpres No. 01 Tahun 2025, Dinas BMBK Provinsi Lampung menjadi salah satu Organisasi Pemerintah Daerah yang terdampak secara signifikan. Berdasarkan data APBD tahun 2025, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp17 miliar yang sebagian besar menyasar pada pos belanja administratif, seperti perjalanan dinas, rapat, pengadaan alat tulis kantor (ATK), hingga konsumsi kegiatan. Pemangkasan terbesar terjadi pada belanja ATK yang mencapai 90 persen, sehingga memaksa birokrasi beradaptasi dengan sumber daya terbatas. Walaupun demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa proyek pembangunan strategis dengan nilai sekitar Rp500 miliar tetap dilaksanakan agar tidak menghambat target pembangunan infrastruktur.

Selain pemotongan anggaran administratif, BMBK juga mengalami penyesuaian DAK dari pemerintah pusat. Dari total DAK sebesar Rp651 miliar, dilakukan pemangkasan sekitar Rp32 miliar sehingga hanya menyisakan Rp619 miliar. Pemangkasan ini berdampak pada penundaan sebagian program pembangunan jalan yang telah direncanakan, terutama di wilayah yang aksesibilitasnya masih rendah. Hal ini menimbulkan dilema, sebab efisiensi memang bertujuan menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi berpotensi memperlebar kesenjangan pelayanan infrastruktur antar daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa BMBK Provinsi Lampung menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, mereka harus menjalankan kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas berbagai pos belanja sesuai mandat Instruksi Presiden. Namun di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan dan perbaikan infrastruktur terus meningkat, terutama karena posisi Lampung yang strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra menuju Jawa. Dengan kondisi tersebut, efektivitas implementasi kebijakan efisiensi sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas BMBK Provinsi Lampung dalam mengatur keseimbangan antara tuntutan disiplin fiskal dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

2.7. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah alur pemikiran yang digunakan oleh penulis, baik yang dikembangkan sendiri maupun yang diambil dari teori yang relevan, untuk mengatasi masalah yang terdapat pada rumusan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No. 01 tahun 2025 di Dinas BMBK Provinsi Lampung. Kerangka berpikir ini dibangun atas dasar keterkaitan antara teori, konsep, serta fenomena kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan. Kerangka penelitian ini diperkuat oleh Konsep *Value for Money* yang menjadi alat untuk menganalisis dalam penelitian ini, karena menekankan pentingnya prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Perspektif ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan efisiensi anggaran benar-benar mampu mengurangi pemborosan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Dalam konteks Dinas BMBK Provinsi Lampung, hal ini berkaitan erat dengan bagaimana penghematan pada belanja operasional seperti perjalanan dinas, rapat, dan ATK dapat diimbangi dengan tetap efektifnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Kerangka Berpikir tersebut, kebijakan efisiensi anggaran menjadi hal utama yang dianalisis implementasinya di Dinas BMBK Provinsi Lampung. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami sejauh mana kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik menurut perspektif teori keuangan publik khususnya prinsip *Value for Money*. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menyajikan alur logis bahwa implementasi kebijakan efisiensi anggaran di daerah tidak hanya soal kepatuhan pada instruksi pusat, tetapi juga tentang kemampuan daerah menjaga kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan stabilitas fiskal melalui tata kelola anggaran yang efisien.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih detail mengenai berbagai fenomena yang dialami subjek penelitian, baik terkait perilaku, motivasi, maupun tindakannya. Fenomena tersebut digambarkan secara natural melalui penggunaan kata-kata dan bahasa sesuai kaidah kebahasaan dalam konteks tertentu dengan tetap berlandaskan metode ilmiah.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dikarenakan penelitian ini digunakan untuk memahami secara komprehensif tentang implementasi dan implikasi kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres No. 01 Tahun 2025 di Dinas BMBK Provinsi Lampung dengan menggunakan perspektif teori keuangan publik khususnya konsep *Value for Money*, selain itu peneliti ingin mengidentifikasi implikasi dari kebijakan efisiensi pada Dinas BMBK.

Menurut Sugiyono (2017), Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk menelaah kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Menurut Mukhtar (2013), Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang digunakan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti serta menemukan pengetahuan atau teori yang relevan dalam jangka waktu tertentu. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji implementasi kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 01 Tahun 2025 pada Dinas BMBK Provinsi Lampung.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan area atau tempat di mana peneliti menemukan serta mengamati fenomena dan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga dapat diperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata dan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Adapun lokasi yang ditentukan dalam penelitian ini ialah berlokasi di Dinas BMBK Provinsi Lampung. Peneliti menemukan bahwa Dinas BMBK Provinsi Lampung merupakan salah satu dinas di Provinsi Lampung yang sangat terdampak oleh kebijakan efisiensi dalam Inpres No. 01 Tahun 2025, karena adanya pemangkasan anggaran dalam kegiatan administratif seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), kegiatan rapat, hingga konsumsi acara (Khoiriah, 2025). Selain itu, terdapat pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp32 miliar dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah daerah. Pemangkasan Dana Alokasi Khusus ini berdampak cukup serius, karena berimplikasi pada penundaan sebagian program pembangunan jalan yang sebelumnya sudah direncanakan untuk tahun anggaran berjalan (Berdikari.co, 2025).

3.3. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini, yaitu menganalisis implementasi kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No. 01 Tahun 2025 pada Dinas BMBK Provinsi Lampung. Selain itu penelitian ini juga ingin melihat implikasi (dampak atau konsekuensi) dari kebijakan efisiensi anggaran yang berdasar pada Inpres No. 01 tahun 2025 pada Dinas BMBK Provinsi Lampung.

3.4. Jenis Sumber Data

Data akan disajikan adalah bentuk kata-kata (tulisan), dan gambar yang mendukung peneliti dalam mengungkapkan permasalahan yang ada. Pada pengumpulan data, peneliti akan melakukan pengambilan data dalam wujud data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

3.4.1. Data Primer

Data primer yang digunakan telah didapatkan langsung dari sumbernya tanpa melalui penghubung, baik dari perorangan ataupun kelompok. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan benar-benar bersifat langsung sesuai kebutuhan penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data primer dilaksanakan melalui teknik wawancara. wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan, secara lisan kepada Pegawai Dinas BMBK Provinsi Lampung untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Penulis melakukan wawancara kepada Plt. Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Bina Program, Kepala Seksi Program dan Anggaran, Kepala Bidang Bina Konstruksi, dan Kepala Bidang Jalan Dinas BMBK Provinsi Lampung.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian didapatkan dengan cara tidak langsung, melainkan melalui pihak lain yang telah mencatat atau mendokumentasikannya sebelumnya. Jenis data ini bersumber dari arsip, laporan historis, maupun dokumen resmi yang sudah tersusun. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder dengan mengakses dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

3.5.1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk dialog yang dilakukan dengan tujuan tertentu antara peneliti sebagai pemberi pertanyaan dan subjek penelitian sebagai pihak yang memberikan jawaban. Peneliti berusaha memperoleh informasi terkait proses pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran pada Dinas BNBK Provinsi Lampung, serta faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilan pengumpulan data. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan rumusan submasalah agar jalannya wawancara lebih sistematis dan terarah. Namun demikian, selain berpedoman pada daftar pertanyaan, peneliti juga menggunakan teknik wawancara bebas sehingga proses interaksi tetap fleksibel dan tidak sepenuhnya terpaku pada pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Tri Susilowati, S.T., M.T.	Plt. Sekretaris Dinas BMBK Provinsi Lampung
2	Ir. M. Abdillah Sjaheru, S.T., M.T.	Kepala Bidang Bina Program Dinas BMBK Provinsi Lampung
3	Ir. Angri Hasdiandi, S.T., M.URP.	Kepala Seksi Program dan Anggaran Dinas BMBK Provinsi Lampung
4	Ir. Yudi Aryanto, S.T., M.T.	Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas BMBK Provinsi Lampung
5	Ir. Tri Susilowati, S.T., M.T.	Kepala Bidang Jalan Dinas BMBK Provinsi Lampung
6	Razzan Fadillah Syafa	Masyarakat Lampung
7	Muhammad Imam Fakhruzi	Masyarakat Lampung

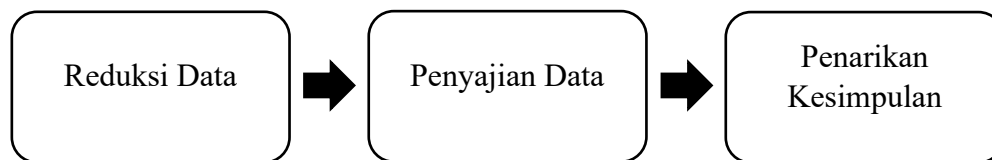
Sumber: Diolah peneliti, 2025

3.5.2. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini mencakup data organisasi subjek penelitian serta berbagai dokumen yang relevan dan dianggap penting. Beberapa dokumen utama tersebut antara lain Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 Tentang SOTK Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Instruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992), terdapat tiga jalur utama dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 2. Tahapan Analisis Data

Sumber: diolah peneliti, 2025

3.6.1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap penyaringan dan pengolahan data mentah yang diperoleh dari catatan langsung. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian, bahkan dimulai sejak sebelum seluruh data terkumpul, melalui kerangka konseptual, rumusan masalah, dan metode pengumpulan data yang dipilih. Aktivitas dalam reduksi data meliputi pembuatan ringkasan, pemberian kode, identifikasi tema, serta pengelompokan data. Esensi dari reduksi data adalah menajamkan, mengklasifikasikan, dan menata informasi agar lebih mudah dipahami dalam proses penarikan kesimpulan. Reduksi tidak selalu berarti mengubah data menjadi angka, tetapi lebih pada kegiatan seleksi, peringkasan, serta penyusunan pola data yang lebih sistematis.

3.6.2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan berbagai informasi agar dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif seperti catatan lapangan. Bentuk-bentuk penyajian tersebut membantu mengorganisasi informasi menjadi lebih padu, sehingga memudahkan peneliti mengidentifikasi apa yang terjadi serta melakukan analisa lebih lanjut, termasuk meninjau ulang kesimpulan yang sudah dibuat.

3.6.3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan sepanjang proses penelitian. Sejak tahap awal pengumpulan data, peneliti mulai menafsirkan makna dari temuan, mencatat

pola, menyusun penjelasan, serta mengenali hubungan sebab-akibat maupun proposisi. Pada mulanya, kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat tentatif, namun seiring perkembangan penelitian, kesimpulan tersebut menjadi lebih terperinci, konsisten, dan kuat. (Agusta, 2003). Verifikasi dilakukan secara berkesinambungan, antara lain dengan menelaah kembali catatan lapangan, melakukan diskusi bersama rekan sejawat guna memperoleh kesepakatan intersubjektif, serta menguji temuan dengan cara membandingkannya dengan data relevan lainnya.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Agar terhindar dari kesalahan dalam data yang diperoleh, peneliti perlu melakukan teknik keabsahan data. Keabsahan data adalah tolak ukur kebenaran hasil penelitian, yang lebih menitikberatkan pada tingkat informasi daripada jumlah narasumber yang terlibat. Menurut Sugiyono (2022), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi lapangan secara faktual serta bebas dari bias. Sugiyono menekankan pentingnya penerapan teknik triangulasi sebagai metode utama. Dalam penelitian ini, keabsahan data diperoleh melalui penggunaan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber diterapkan dengan membandingkan informasi dari sejumlah informan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Tujuannya untuk melihat kesesuaian maupun perbedaan pandangan antar informan sehingga data yang diperoleh lebih valid, akurat, dan komprehensif.
2. Triangulasi Teknik diterapkan dengan cara mengecek data yang sama menggunakan beberapa metode pengumpulan, seperti wawancara dan studi dokumentasi. Hal ini bertujuan memastikan konsistensi serta keandalan informasi yang diperoleh dari subjek maupun objek penelitian.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implikasi kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa Dinas BMBK telah menerjemahkan kebijakan efisiensi anggaran ke dalam langkah-langkah konkret melalui pemangkasan berbagai pos pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan prioritas layanan, terutama pada aktivitas administratif seperti perjalanan dinas, rapat, dan kebutuhan perkantoran. Langkah tersebut memungkinkan alokasi anggaran difokuskan pada pekerjaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum tertangani sepenuhnya. Kebijakan efisiensi ini juga memicu perubahan signifikan dalam tata kelola internal, di mana aparatur dituntut bekerja dengan standar kinerja yang lebih ketat, menggunakan metode perencanaan yang lebih terukur, serta memanfaatkan teknologi digital guna mempercepat koordinasi dan menekan biaya operasional, sehingga pola kerja organisasi bergeser menuju sistem yang lebih disiplin dan berorientasi hasil.

Implikasi dari efisiensi anggaran juga meningkatkan disiplin fiskal dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Pelayanan publik menjadi lebih terarah karena sumber daya diarahkan pada kegiatan yang benar-benar penting, seperti perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar. Namun demikian, efisiensi juga memunculkan konsekuensi tertentu, seperti penundaan pembangunan jalan dan jembatan walaupun anggaran yang diberikan untuk OPD terkait bertambah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Dinas BMBK Provinsi Lampung disarankan untuk memperkuat penerapan prinsip *value for money* secara operasional melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) efisiensi anggaran yang mengatur secara jelas mekanisme penghematan belanja, penentuan prioritas program, serta pengukuran kinerja berbasis *output dan outcome*. SOP tersebut perlu dijadikan pedoman teknis dalam penyusunan dan pelaksanaan program agar efisiensi anggaran tidak hanya berorientasi pada pemangkasan biaya, tetapi juga pada optimalisasi manfaat pembangunan infrastruktur. Selain itu, Dinas BMBK perlu menerapkan perencanaan anggaran berbasis prioritas teknis, seperti tingkat kerusakan jalan, urgensi pelayanan publik, dan konektivitas wilayah, sehingga anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada program yang paling berdampak bagi masyarakat. Dalam rangka menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, dinas juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan, monitoring, dan evaluasi proyek pembangunan, khususnya sebagai pengganti keterbatasan perjalanan dinas. Upaya ini perlu didukung dengan evaluasi kinerja program secara berkala serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja agar kebijakan efisiensi dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung disarankan untuk menyusun kebijakan teknis turunan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang lebih adaptif terhadap karakteristik sektor strategis daerah, khususnya sektor infrastruktur jalan dan jembatan. Kebijakan teknis tersebut perlu memberikan ruang fleksibilitas dalam penentuan prioritas program agar pelaksanaan efisiensi anggaran tidak berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dan pemerataan

pembangunan. Selain itu, Pemerintah Provinsi perlu memperkuat koordinasi dan sinergi perencanaan dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur yang berdampak efisiensi anggaran. Sinergi ini penting agar kebijakan efisiensi tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan antarwilayah dan tetap mendukung konektivitas serta mobilitas masyarakat di seluruh Provinsi Lampung.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur secara lebih objektif tingkat efisiensi, efektivitas, dan dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kinerja pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian dengan meneliti dinas yang memiliki fungsi serupa di tingkat kabupaten/kota, seperti Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Bina Marga kabupaten/kota, guna memperoleh gambaran komparatif mengenai implementasi kebijakan efisiensi anggaran pada level pemerintahan yang berbeda. Penelitian pada tingkat kabupaten/kota penting dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, serta tantangan teknis yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *value for money*, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi pengelolaan anggaran sektor infrastruktur di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, V., & Herliana, A. (2025). Analisis Sentimen Publik atas Kebijakan Efisiensi Anggaran 2025 dengan Text Mining dan Natural Language Processing. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 2182-2194.
- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 179-188.
- Aronson, J. Richard. (1985). *Public Finance*. Penerbit: Mc Graw-Hill Book Company.
- Ateh, M. Y., Prasajo, E., & Huseini, M. (2019, November). The Impact of Performance Management Implementation on Effectiveness and Efficiency of Government Budget Use: Indonesian case. In *Eastern Regional Organization for Public Administration Conference (EROPA 2018)* (pp. 55-64). Atlantis Press.
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam pengawasan dan kendala-kendala terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234-8245.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 92.
- Dua, K. A. (2023). Analisis *Value for Money* Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka). *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 373-387.
- Dwifarchan, R. M. R., & Sulistiyanti, U. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 23-33.
- Dye, T. R. (1972). *Understanding Public Policy*. *United States: Pearson Education, Inc.*
- Easton, D. (1957). The Political System. *World Politics*, 9(3), 383-400.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, Londong England.
- Fahrianta, R. Y., & Carolina, V. (2016). Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 13(1).

- Grindle, Meriless S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Semarang: *Widya Karya*.
- Harvey S. Rossen, *Public Finance: Essay for the Encyclopedia of Public Choice* (Princeton University: CEPS Working Paper No. 80, Maret 2002)
- Hartono, H. (2025). Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 2666-2672.
- Ilyas, M. I. F., & Syamsuri, H. (2023). Analysis Of Local Government Financial Performance Based On The Method *Value for Money*. *International Journal of Business and Social Science Research*, 4(10-11), 1-6.
- Instruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Beilanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Jaelani, A. (2014). *Keuangan publik Islam: Refleksi APBN dan politik anggaran di Indonesia*.
- Kasmad, R. (2013). *Studi implementasi kebijakan publik*. Makassar: *Kedai Aksara*.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2).
- Mahmudi. (2011). *Public sector accounting*. UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Public sector accounting*. ANDI Publisher. Yogyakarta.
- Maulana, D., Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Banten : CV. AA RIZKY.
- Musgrave, R.A., & Musgrave, P.B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Nasir, M. (2010). *Perubahan Sistem Penganggaran di Indonesia dan Dampaknya pada Kinerja*.
- Nur, A. S., Sihabudin, A., & Syadzily, A. H. (2020). Kinerja pengelolaan jalan dan jembatan dalam perspektif pelayanan publik pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi banten tahun 2017. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1).
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.

- Pane, D. A., Luthfi, M., & Alansori, A. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Mekanisme Pencairan Dana Pihak Ketiga Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati (JRAMM)*, 12(4), 337-34
- Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 Tentang SOTK Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- Pramesti, R. F., Firdaus, A. A., Yulita, K., & Thoyyibah, M. (2025). Analisis Efisiensi Apbn Era Prabowo: Kajian Ekonomi Dan Analisis Sentimen Publik. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(2), 1147-1161.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press.
- Purnomo, B. S., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 6(3), 467-476.
- Putri, N. A., Aldafina, S., Tsabita, B., Azzahara, V., Sulaiman, H., & Soemamidjaja, J. B. (2025). Pengaruh Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan Di Jakarta Pusat. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 11-23.
- Safitri, A., Raisyah, S., Setiyani, T. A., Kamilah, N. A., Suriansyah, A., & Purwanti, R. (2025). Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran BOS/BOP dan Implikasinya terhadap Kualitas Layanan Pendidikan di RA Raudhatul Amin. *Jurnal Ilmiah Pendidik Indonesia*, 4(1), 65-80.
- Salman, S., & Ikbal, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 68-72.
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Seran, D. A. N. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. *Global Eksekutif Teknologi*.
- SetyaJ, M. A., & Faridah, I. (2022). Pengawasan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Dalam Melakukan Kegiatan Rutin Perawatan Jalan Kota Bandar Lampung di Era Covid-19. *Jurnal Stia Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 8(2), 56-62.
- Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan publik dasar bidang sosial di kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik, 6(2).
- Walizi, H., & Kom, S. (2025). Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Di Bappeda Muara Enim. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Maret), 1707-1718.
- Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisa. Intermedia, Jakarta
- Yuliati, D. (2025). Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di BAPPEDA Provinsi NTB: Implikasi Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 31-42.
- Yuliyah, P. L. R., & Ardini, L. (2022). Analisis Kinerja Pelaksanaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2016-2020. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 10(2), 118-128.
- Zhao, J., Liu, H. J., Love, P. E., Greenwood, D., & Sing, M. C. (2023). Value for Money assessments for Public-Private Partnerships: characteristics, research directions, and policy implications. *Developments in the Built Environment*, 16, 100246.